



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**PUPR dan Dinkes Diminta Selesaikan Temuan BPK**

**Kelebihan Bayar  
Rp 542 Juta**

**SELUMA** - Dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terhadap realisasi anggaran tahun 2019 yang dilaksanakan di Kabupaten Seluma, ditemukan kelebihan bayar mencapai Rp 542 juta. Temuan itu di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Seluma. Diberi tenggat waktu 60 hari sejak LHP ini dipublikasikan, kedua OPD tersebut tuntas mengembalikan kelebihan bayar.

Ketua DPRD Seluma, Nofi Eriyan Andesca mengatakan temuan yang ada di Dinas PUPR sebesar Rp 318 juta sedangkan di Dinas Kesehatan sebesar Rp 224 juta. Temuan tersebut berupa

inta PUPR dan Dinkes segera menyelesaikan temuan BPK. "Harus segera dituntas temuan itu," singkatnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Seluma, Rudi Syawaludin, S.Sos mengaku langsung memindaklanjuti LHP BPK tahun 2019. Melakukan konfirmasi dengan pihak rekanan yang mengerjakan dua paket proyek yang jadi temuan tersebut. Rekanan bersedia melakukan pengembalian kelebihan bayar. Malah salah satu rekanan sudah tuntas melakukan pengembalian.

"Dua paket proyek yang mengalami kelebihan pembayaran yakni pada Pembangunan Puskesmas Kembang Mumpo Rp 77.600.000 dan telah dikembalikan pihak rekanan. Sedangkan pada proyek Pembangunan Puskesmas Renah Gajah Mati (RGM) terdapat kelebihan pembayaran Rp

kelebihan pembayaran dengan di lima paket proyek di Dinas PUPR dan dua paket proyek di Dinas Kesehatan Seluma. "Diberi waktunya selama 60 hari untuk dua OPD itu menyelesaikan pengembalian temuan tersebut. Bila tidak, maka temuan ini akan ditindaklanjuti ke proses hukum," ungkapnya.

Karena sudah diberi tenggat waktu, DPRD Seluma mengigatkan kedua OPD itu untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Ia berharap agar temuan itu tidak menjadi permasalahan hukum. "Secepatnya diselesaikan. Akan lebih baik lagi sebelum 60 hari. Kita tidak ingin temuan ini menjadi permasalahan hukum," tegasnya.

Senada disampaikan Inspektur Inspektorat Seluma, Deddy Ramdhani, SE, M.SE, MA mengatakan temuan BPK tersebut sedang ditindaklanjuti dua OPD terkait. Pihaknya telah mem-

146 juta. Rekanan yang mengerjakan proyek itu sudah membuat surat pernyataan bersedia mengembalikan kelebihan bayar," jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Seluma, M Saipullah, ST, MT mengatakan sedang memindaklanjuti LHP BPK. Telah memerintahkan rekanan di lima paket proyek yang menjadi temuan untuk segera mengembalikan kelebihan bayar ke kas daerah. Selain itu, juga sudah dilakukan pemberian Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejari Seluma untuk membantu penagihan. Diharapkan dengan sudah dilakukannya SKK dengan Kejari Seluma dan Dinas PUPR Seluma, bisa menuntaskan temuan tersebut. "Ya langsung kita tindaklanjuti, sudah juga berkoordinasi dengan Kejari Seluma. Kita berharap dalam waktu dekat sudah selesai temuan itu," pungkasnya. (cup)